

YUSTISIA

Jurnal Hukum

- 
- **WIDYO PRAMONO**
Penyamaan Persepsi dan Kerjasama dalam Pemeriksaan di Bidang Penajakan untuk Mendukung Optimalisasi Penerimaan Negara
 - **MURNI, ERMA RUSDIANA, RINA YULIANTI**
Karakteristik Konsumen dan Faktor Penghambat Pendirian BPSK (Badan Penyelatan Sengketa Konsumen) di Wilayah Madura
 - **SINTA DEWI**
Konsep Perhindangan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia
 - **RAMLAN**
Perbaikan Melawan Hukum Peleburan Modal Asing Bidang Usaha Perikanan di Indonesia
 - **PURITYONO, JAMALI WIWOHO, TRIYANTO**
Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
 - **SUPANTO**
Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Antisipasinya dengan *Penal Policy*
 - **MOCH NAJIB IMANULLAH, EMMY LATIFAH, AMUGRAH ADISTUTI**
Peran dan Kedudukan Petani dalam Sistem Perdagangan Internasional
 - **ISHARYANTO, SURANTO, JATMIKO ANOM SUHODO, ADRIANA G. FIRDAUSSY, & ANDINA ELOK PURI MAHARANI**
Model Kapasitas Birokrasi untuk Pengembangan Integritas Perkumpulan Petani Pemakai Air (PPa) dalam Bangka Pencapaian Kedaulatan dan Keamanan Pangan Lokal
 - **RISKA ANDI FITRIONO, BUDI SETYANTO, REHMALIENKEIN GINTING**
Penegakan Hukum Malpraktik melalui Pendekatan Mediasi Pinal
 - **SEPRIANI**
Status Hukum Kontraktor *Private Military and Private Security Companies* dalam Hukum Humaniter Internasional
 - **DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI**
Pendayagunaan *Freies Ermessen* Pejabat Pemerintah dalam Konsep Negara Kesejahteraan
 - **YOVON M DARUSMAN**
Kedudukan serta Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional
 - **FRANCISCUS XAVERIUS WARTOYO**
Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Penyelektoran Pendidikan Nasional

■ Edisi 94

■ JANUARI - APRIL 2016

■ Tahun XXV

■ ISSN 0852 - 0941

Terakreditasi

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 56/DIKTI/Kep/2012, 24 Juli 2012 tentang Hasil Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (Periode I Tahun 2012)

JURNAL HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

YUSTISIA

ISSN: 0852-0941

TERAKREDITASI

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 56/DIKTI/Kep/2012, Tanggal 24 Juli 2012
tentang Hasil Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah
(Periode I Tahun 2012)

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum

Dewan Redaksi:

Ketua: Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., PhD.

Wakil Ketua: Wnarno Budyatmojo, S.H., M.S.

Sekretaris: Kukuh Tejomurti, S.H., LL.M.

Wakil Sekretaris: Racima Indriyani, S.H., LL.M.

Anggota:

Prof. Dr. Hartiwiningdh, S.H., M.Hum.

Dr. Djoko Wahju Winarno, S.H., M.S.

Dr. Soehartono, S.H., M.Hum

Dr. Al Sentot Suderwanto, S.H., M.Hum.

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.

Dr. Pujiono, S.H., M.H.

Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H.

Bambang Sanjaya, S.H., M.Hum.

Penerbitan dan Sirkulasi:

Sabar Slamet, S.H., M.H.

Pembantu Pelaksana:

Arif Farica Tri Rejeki, S.Pd., M.Si

Enny Sarastri, S.H.

Gunarto

Suparso

Hermawan Pribadi, S.Sos

Alamat Redaksi:

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta. Telp./Fax. 0271 - 664989

Web: <http://www.urnal.hukum.uns.ac.id>

e-mail: th.uns@uns.ac.id

DAFTAR ISI

Penyamaan Persepsi dan Kerjasama dalam Pemeriksaan di Bidang Perpajakan untuk Mendukung Optimalisasi Penerimaan Negara Widyo Pramono	5
Karakteristik Kasus Konsumen dan Faktor Penghambat Pendirian BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di Wilayah Madura Murni, Erma Rusdiana, Rina Yulianti	14
Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan <i>Cloud Computing</i> di Indonesia Sinta Dewi	22
Perbuatan Melawan Hukum Penanaman Modal Asing Bidang Usaha Perikaran di Indonesia Ramlan	31
Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pujiyono, Jamal Wiwoho, Triyanto	41
Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (<i>Cyber Crime</i>) dan Antisipasinya dengan Penal Policy Supanto	52
Peran dan Kedudukan Petani dalam Sistem Perdagangan Internasional Moch Najib Imanullah, Emmy Latifah, Anugrah Adistuti	71
Model Kapasitas Birokrasi untuk Pengembangan Integritas Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3a) dalam Rangka Pencapaian Kedaulatan dan Keamanan Pangan LokaL Isharyanto, Suranto, Jatmiko Anom Husodo, Adriana G. Firdaussy, dan Andina Elok Puri Maharani	79
Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal Riska Andi Fitriono, Budi Setyanto, Rehnalemken Ginting	87
Status Hukum Kontraktor <i>Private Military And Private Security Companies</i> dalam Hukum Humaniter Internasional Sefriani	94
Pendayagunaan <i>Freies Ermessen</i> Pejabat Pemerintahan dalam Konsep Negara Kesejahteraan Dyah Adriantini Sintha Dewi	104
Kedudukan Serta Perindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional Yoyon M Darusman	111
Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Franciscus Xaverius Wartoyo	118

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI DAN DATA PRIBADI DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN CLOUD COMPUTING DI INDONESIA

Sinta Dewi
Fakultas Hukum Universitas Pacjadjaran
Email:sintadewirosadi@yahoo.com

Abstract

The increasing use of internet technology has spawned new challenges to the protection of privacy and personal data, especially with the increasing practice of collection, use and dissemination of personal data of a person. The lack of specific instruments and regulations will cause of the weakness of the privacy and data personal protection mechanism, especially in the use of cloud computing technology. Cloud computing is a technology that uses the internet and central remote servers to maintain or manage user data. It allows users to use applications without installation so that personal files can be accessed anywhere and anytime through internet access. This technology enables efficiencies by centralizing storage, processing and data memory. However, on the other hand, cloud computing has raised a new legal issue is how could the personal data of the user of cloud computing be protected from a wide range of abuses by the provider of cloud computing and the third party. This legal issue become very significant because if a personal data of the user of cloud computing is misused by the provider or the third party, then it is contrary to human rights, namely the protection of privacy and personal data which has been protected by international, regional, and national instruments. So far, Indonesia has not been having regulation that specifically protect its citizens from the personal data abuse whether committed by governments, private companies or individuals. Therefore, this study aims to create the concept of adequate regulation in order to provide protection for user of cloud computing services in Indonesia.

Keywords: protection, privacy, personal data, cloud computing.

Abstrak

Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet memberikan tantangan baru dalam perlindungan atas privasi dan data pribadi, terutama cengah semakin meningkatnya praktik pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data pribadi seseorang. Ketertinggalan instrumen dan regulasi menjadi salah satu pemicu lemahnya mekanisme proteksi terhadap privasi dan data pribadi khususnya dalam penggunaan teknologi *cloud computing*. *Cloud computing* adalah teknologi yang menggunakan internet dan server pusat yang jauh untuk menjaga atau mengelola data pengguna. *Cloud computing* membantu pengguna untuk menggunakan aplikasi tanpa melakukan instalasi sehingga file pribadi dapat diakses di manapun dan kapanpun melalui akses internet. Teknologi ini memungkinkan efisiensi dengan memusatkan penyimpanan, pemrosesan dan memori data. Namur demikian, di sisi lain, *cloud computing* telah menimbulkan permasalahan hukum baru yaitu bagaimana data pribadi pengguna *cloud computing* terlindungi dari berbagai macam pengungkapan dan pendistribusian oleh penyedia jasa *cloud computing* terhadap pihak ketiga. Permasalahan hukum ini menjadi sangat signifikan karena jika data pribadi seseorang disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini bertentangan dengan hak dasar manusia yaitu perlindungan terhadap privasi dan data pribadi seseorang yang telah dilindungi oleh instrumen internasional, regional dan nasional. Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus melindungi warga negara dari praktik pemanfaatan data pribadi yang sewenang wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun individu. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengguna jasa *cloud computing* di Indonesia.

Kata kunci: perlindungan, privasi, data pribadi, *cloud computing*.